

DRAFT DOCUMENT



BLUE PRINT PENGAWASAN KOPERASI

Dr.Ahmad Subagyo

Dipersiapkan untuk Deputi Pengawasan Kemenkop UKM RI
Dipaparkan pada Acara Workshop Sistem Pengawasan Koperasi
Jakarta, 21 Februari 2018

This Photo by Unknown Author is licensed
under [CC BY-SA](#)

BAGIAN



01

PENDAHULUAN

02

USAHA SIMPAN PINJAM

03

DATA

04

PROSES PENGAWASAN

OUTPUT PENGAWASAN

05

INFRASTRUKTUR PENUNJANG


06

KESIMPULAN

07

REKOMENDASI

08



BAGIAN I **PENDAHULUAN**

LATAR BELAKANG KEGIATAN

- ❑ Mandat beberapa peraturan (UU No 23/2014, PP no 18/2016, Perpres No 62/2015,) bahwa fungsi Kementerian KUKM adalah perumusan dan penetapan kebijakan termasuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaannya di bidang **pengawasan koperasi**, maka **dibentuk Kedeputian Pengawasan**
- ❑ Kedeputian Pengawasan membutuhkan Kerangka Sistem Pengawasan Koperasi
- ❑ Dukungan Tim Bank Dunia di Jakarta dengan menyiapkan Usulan Kerangka Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

TUJUAN KEGIATAN PENYUSUNAN

- Mengusulkan **Fokus Kebijakan** Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam
- Memberikan ***advis* Disain Sistem Kerangka Pengawasan Koperasi**, khususnya Koperasi Simpan Pinjam guna terselenggaranya pengawasan yang efisien dan efektif
- Merekomendasikan **Usulan implementasi** Sistem Kerangka Pengawasan Koperasi dalam lima tahun kedepan (tahun 2019-2023)

⇒ ⇒ ⇒ Kerangka Sistem Pengawasan KSP diharapkan bisa menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan terpadu serta bisa menjadi acuan perencanaan kegiatan Kedeputian Pengawasan dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Landasan Pengawasan Koperasi

1. **Undang-Undang No 25 tahun 1992** tentang Perkoperasian
2. **Undang-Undang No 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah
3. **Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
4. **Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1998** tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
5. **Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018** tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. **Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Ada Kabid Pengawasan atau Kasi Pengawasan)
7. **Peraturan Presiden No 62 Tahun 2015** tentang Kementerian Koperasi dan UKM
8. **Permen Koperasi dan UKM No 17 Tahun 2015** tentang Pengawasan Koperasi
9. **Permen Koperasi dan UKM No 9 Tahun 2018** tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi
10. **Permen Koperasi dan UKM No 11 Tahun 2018** tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Bidang Pengawasan

No	Peraturan	Tentang
1	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 17/Per./M.KUMK/IX/2015	Pengawasan Koperasi
2	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 05/Per/Dep.6/III/2016	Pedoman Teknis Mengenai Norma, Standar, Prosedur, Tata Cara, dan Kode etik Pengawas Koperasi;
3	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016	Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
4	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016	Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
5	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 08/Per/Dep.6/IV/2016	Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
6	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 09/Per/Dep.6/IV/2016	Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
7	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor: 11/Per/Dep.6/IX/2016	Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
8	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 12/Per/Dep.6/XII/2016	Penerapan Sanksi
9	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 13/Per/Dep.6/XII/2016	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
10	Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 02/Per/Dep.6/IV/2017	Petunjuk Teknis Pengawasan Kepatuhan Koperasi



TUJUAN PENGAWASAN

TUJUAN REGULATOR

TUJUAN OBYEK YG DIAWASI

- 01** Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintah
- 02** Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi untuk menjaga dan mengembangkan Koperasinya secara SEHAT

- 01** KOPERASI DAPAT BERKEMBANG (Growing)
- 02** KOPERASI MAMPU BERKELANJUTAN (Sustainable)

GENERAL DESIGN

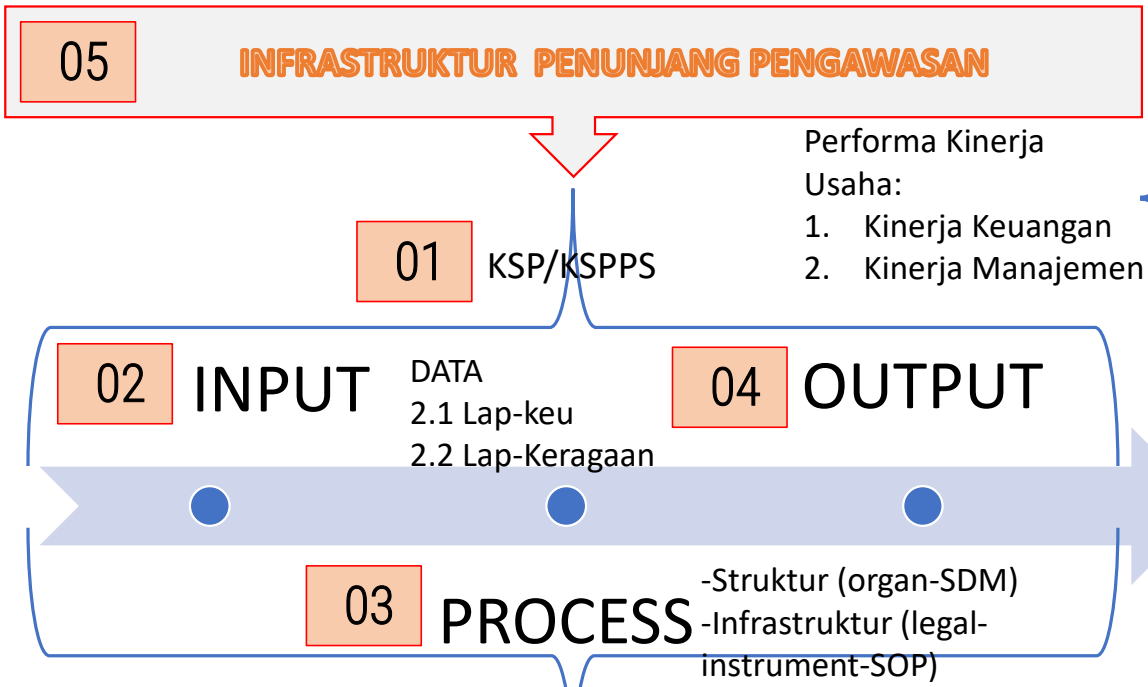
PENDEKATAN & ORIENTASI

Dalam Menyusun Kerangka Pengawasan Koperasi

- 01** PENGOPTIMALAN KINERJA ASDEP
PENGAWASAN
- 02** OUTPUT PENGAWASAN KOPERASI
BERORIENTASI PADA KEPATUHAN TERHADAP
REGULASI & PRINSIP-PRINSIP BISNIS YANG
SEHAT
- 03** MENGEFEKTIFKAN INFRASTRUKTUR
PENUNJANG PERKOPERASIAN DALAM
MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN
- 04** PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM MELAKUKAN PROSES
PENGAWASAN KOPERASI

GENERAL DESIGN SISTEM PENGAWASAN

DEPUTI PEMBIAYAAN
DEPUTI KELEMBAGAAN



- PENKES**
- ✓ Sehat
 - ✓ Cukup Sehat
 - ✓ Kurang Sehat
 - ✓ Tidak Sehat

- Performa Kinerja Usaha:
1. Kinerja Keuangan
 2. Kinerja Manajemen

- Dasar untuk Penyusunan:
1. RKA
 2. Pembinaan Koperasi

- Proses Pengawasan**
- 3.1. Desk Evaluation (Kepatuhan)
 - 3.2. Pemeriksaan Kelembagaan
 - 3.3. Pemeriksaan Usaha Simpin
 - 3.4. Penkes (Penkes)
 - 3.5. Pemberian Sanksi

- Performa Lembaga yang berprinsip pada tiga pilar :
1. GCG
 2. SPI
 3. RM

- RATING**
- ✓ AAA
 - ✓ AA
 - ✓ A
 - ✓ BBB
 - ✓ BB
 - ✓ B

- Manfaat Penkes:
1. Perpanjangan ijin operasional (batasi 3 th)
 2. Syarat berhubungan dg stakeholder lain (LK/Kementerian Teknis)
 3. Bimtek
 4. Akses Dana Sosial

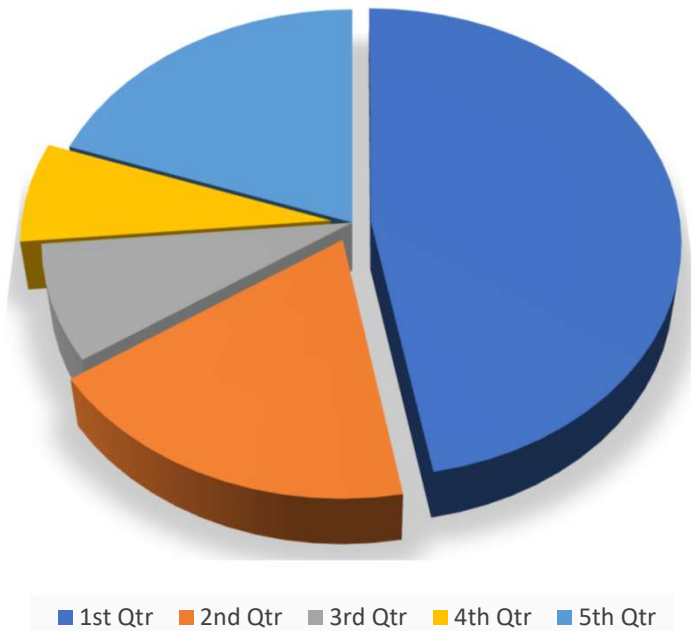
Risk Analysis Matrix

		Consequences				
		Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Likelihood	Almost certain	Low	Medium	High	Extreme	Extreme
	Likely	Low	Medium	High	High	Extreme
	Possible	Low	Medium	Medium	High	Extreme
	Unlikely	Low	Low	Medium	Medium	High
	Rare	Low	Low	Medium	Medium	Medium

- Manfaat Rating:
1. Sumber Investasi (DN/LN)
 2. Syarat masuk ke pasar modal
 3. Syarat Pembukaan kantor layanan di LN
 4. Syarat kerjasama dengan BU lain

CURRENT CONDITION

GENERAL CONSTRAINT



PRASYARAT PENGAWASAN EFEKTIF

01

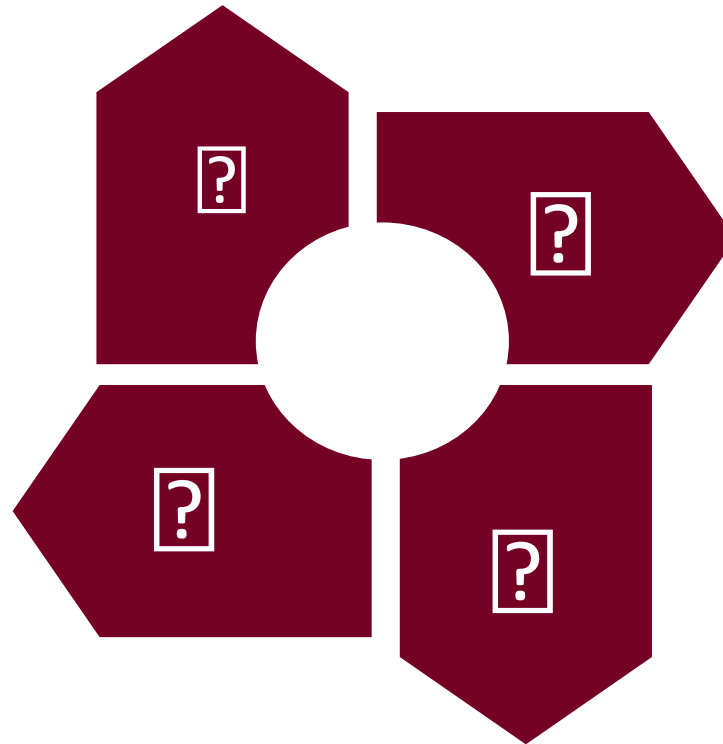
KOPERASI MEMILIKI 3 SYARAT:

1. KUALIFIKASI USAHA KECIL KE ATAS
2. MEMILIKI IJIN OPERASIONAL
3. MEMILIKI LAPORAN RAT

02

PEJABAT PENGAWAS MEMILIKI 2 SYARAT MINIMAL:

1. BERSERTIFIKAT KOMPETENSI PENGAWAS
2. ANGGOTA ASN



03

REGULASI YANG MEMADAHAI :

1. SAH SECARA HUKUM
2. JUKLAK PENGAWASAN BERDASAR PADA RUJUKAN HUKUM YANG SAH

04

SISTEM PELAPORAN BERBASIS TEKNOLOGI :

1. ADA PUSAT DATA
2. PENGIRIMAN LAPORAN SECARA ONLINE
3. PUSAT ANALISA DATA



BAGIAN II

USAHA SIMPAN PINJAM

KSP-USP & KSPPS-USPPS

1. Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi-2018



KLASIFIKASI USAHA KOPERASI

Kualifikasi Usaha Mikro
Koperasi beraset < Rp. 2,5M
Anggota < 200 orang

1

Kualifikasi Usaha Kecil
Koperasi Beraset Rp. 2,5M - Rp. 50 M
Anggota berjumlah Min 200 - < 2000

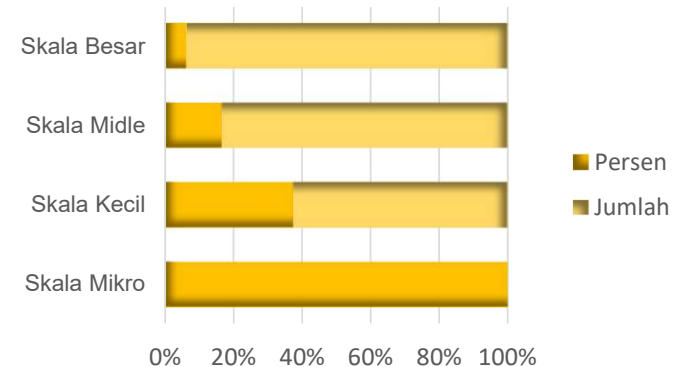
2

Kualifikasi Usaha Besar
Beraset Lebih dari Rp. 1 Triliun
Beranggota > 20.000

4

Kualifikasi Usaha menengah
Koperasi beraset Rp. 50 M - Rp. 1T
Anggota berjumlah min 20.000

3



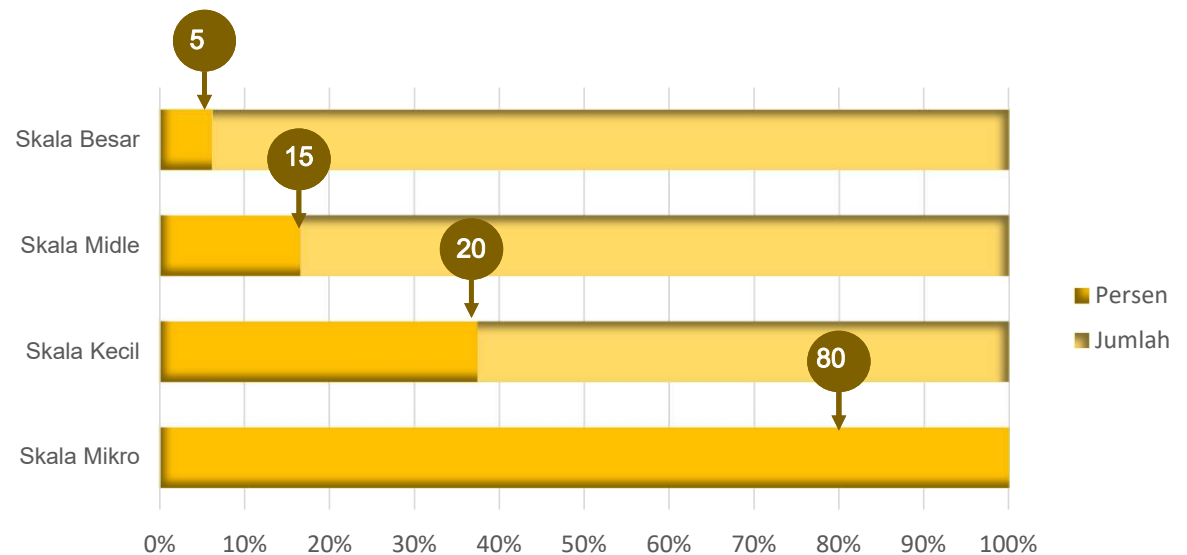
DASAR KLASIFIKASI

	MIN	MAX
MIKRO ASET	15.000.000	2.500.000.000
MIKRO ANGGOTA	20	200
MIKRO JML PINJAMAN/ANG	750.000	12.500.000
KECIL ASET	2.500.000.000	50.000.000.000
KECIL ANGGOTA	200	2.000
KECIL JML PINJAMAN/ANG	12.500.000	25.000.000
MIDDLE ASET	50.000.000.000	1.000.000.000.000
MIDDLE ANGGOTA	2.000	20.000
MIDDLE JML PINJAMAN/ANG	25.000.000	50.000.000
BESAR ASET	1.000.000.000.000	
BESAR ANGGOTA	20.000	
BESAR JML PINJAMAN/ANG	50.000.000	

PETA KOPERASI

Slide ini menjelaskan tentang kondisi usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam tingkatan skala yang berbeda-beda

Klasifikasi usaha Koperasi terbagi menjadi 4 KUK (Klasifikasi usaha Koperasi) yaitu: KUK-1 (mikro), KUK-2 (kecil), KUK-3 (menengah), dan KUK-4 (besar)



PROFIL KOPERASI



2016

- Koperasi Sehat 10%
- Koperasi Cukup Sehat 30%
- Koperasi Kurang Sehat 20%
- Koperasi tidak Sehat 5%
- Tidak ter-PENKES 35%

2017

- Koperasi Sehat 15%
- Koperasi Cukup Sehat 35%
- Koperasi Kurang Sehat 15%
- Koperasi tidak Sehat 5%
- Tidak ter-PENKES 30%

Paparan ini menjelaskan dan menggambarkan kinerja PENKES dalam 2 tahun terakhir , dimana menunjukkan keterjangkauan kinerja Penkes dan profil koperasi di Indonesia

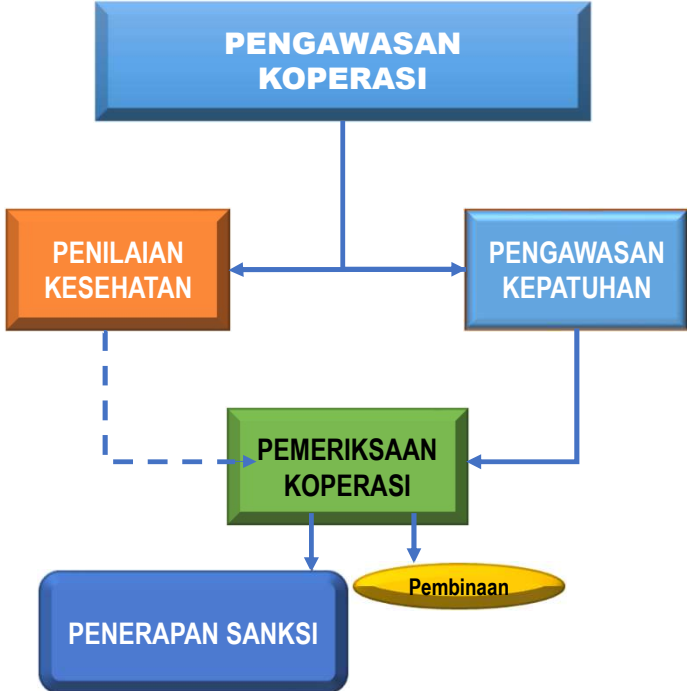


BAGIAN III.

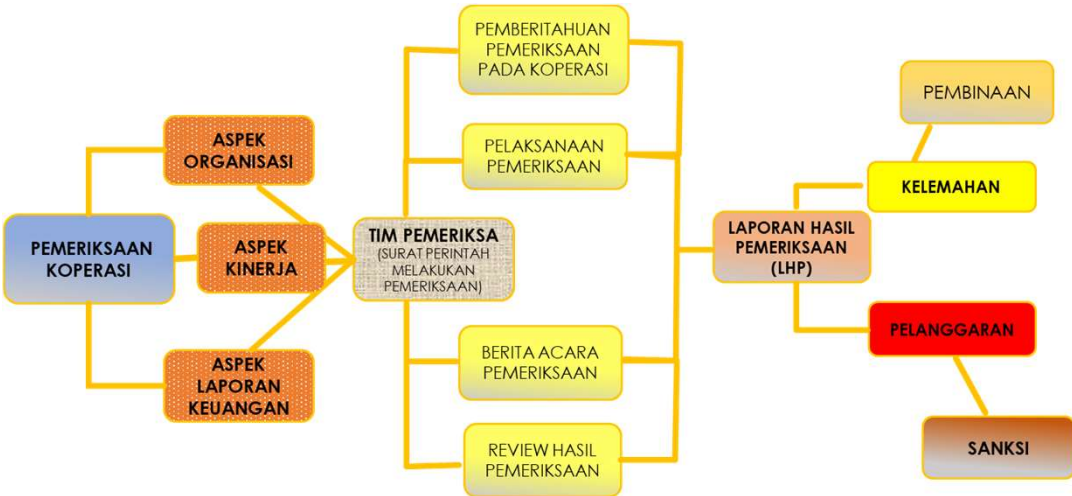
D A T A.

EXISTING CONDITION

SKEMA PENGAWASAN / PEMERIKSAAN KOPERASI



PROSES PENGAWASAN



CONCEPT RECOMENDATION

SISTEM PENGAWASAN



05

INFRASTRUKTUR LEMBAGA PENUNJANG PENGAWASAN

Infrastruktur Penunjang:

- 5.1. Biro Informasi Pinjaman
- 5.2. Koperasi Jasa Audit
- 5.3. Koperasi sekunder
- 5.4. Lembaga Sertifikasi Profesi
- 5.5. Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Performa & Kinerja Koperasi :

- 4.1 Kinerja Keuangan & Manejemen
- 4.2 Kinerja Organisasi

01

- 1.1 KSP
- 1.2 KSPPS

4.1 PENKES

- ✓ Sehat
- ✓ Cukup Sehat
- ✓ Kurang Sehat
- ✓ Tidak Sehat

Manfaat Penkes:

1. Perpanjangan ijin operasional (batasi 3 th)
2. Syarat berhubungan dg stakeholder lain (LK/Kementerian Teknis)
3. Bimtek
4. Akses Dana Sosial

02 INPUT

04 OUTPUT

DATA

- 2.1 Lap-keu
- 2.3 lap-RAT

03

PROCESS

- 3.6 Struktur (organ-SDM)
- 3.7 Infrastruktur (instrument-SOP)

Risk Profile

4.2 RATING

- ✓ AAA
- ✓ AA
- ✓ A
- ✓ BBB
- ✓ BB
- ✓ B

Manfaat Rating Risiko:

1. Sumber Investasi (DN/LN)
2. Syarat masuk ke pasar modal
3. Syarat Pembukaan kantor layanan di LN
4. Syarat layanan Lembaga penunjang

Risk Analysis Matrix

	Consequences				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost certain	Low	Medium	High	Extrema	Extrema
Likely	Low	Medium	High	High	Extrema
Possible	Low	Medium	Medium	High	Extrema
Unlikely	Low	Low	Medium	Medium	High
Rare	Low	Low	Medium	Medium	Medium

Dasar untuk Penyusunan:

1. RKA
2. Pembinaan Koperasi

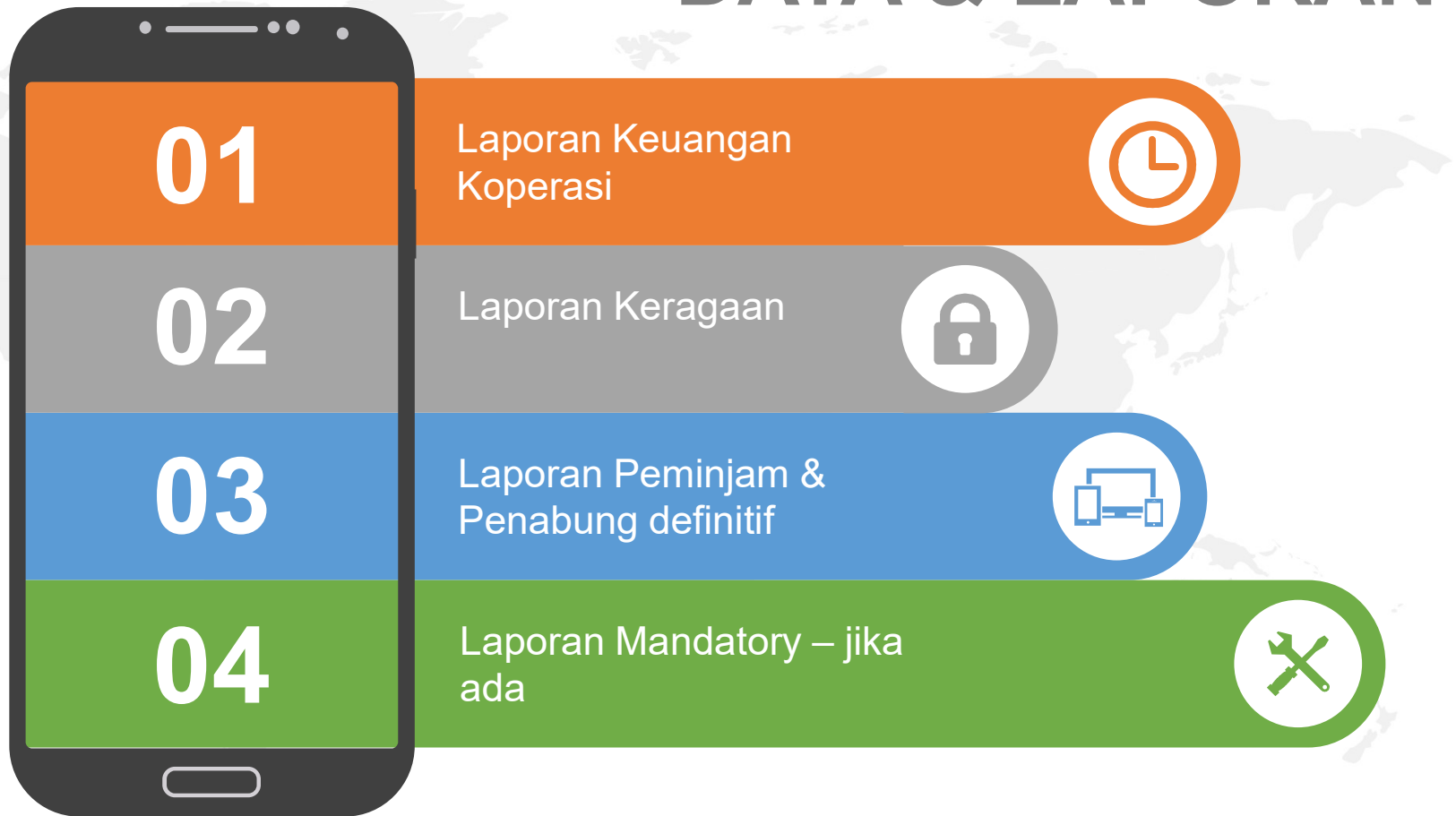
Proses Pengawasan

- 3.1. Desk Evaluation (Kepatuhan)
- 3.2. Pemeriksaan Kelembagaan
- 3.3. Pemeriksaan Usaha Simpin
- 3.4. Penkes (Penkes)
- 3.5. Pemberian Sanksi

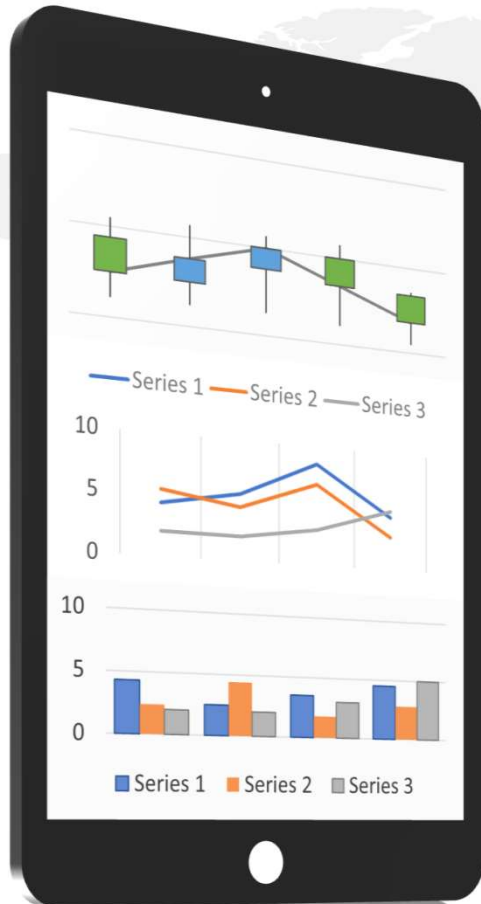
Profil Risiko :

- 4.3 Likuiditas
- 4.4 Kredit
- 4.5 Operasional
- 4.6 Pasar
- 4.7 Hukum

DATA & LAPORAN



ISI LAPORAN



1. KEUANGAN: Neraca – PHU – Arus Kas – Laporan Pendukung



2. KERAGAAN: Laporan tentang tata-kelola Kelembagaan Koperasi



3. PENGGUNA JASA: Data Pemilik & Pengguna dan Definitif (Nama-Jml-alamat-status angg/non-anggota)



4. LAPORAN KHUSUS: sesuai yang diminta regulator, misal Pajak-kredit program-dan sebagainya (jika ada)

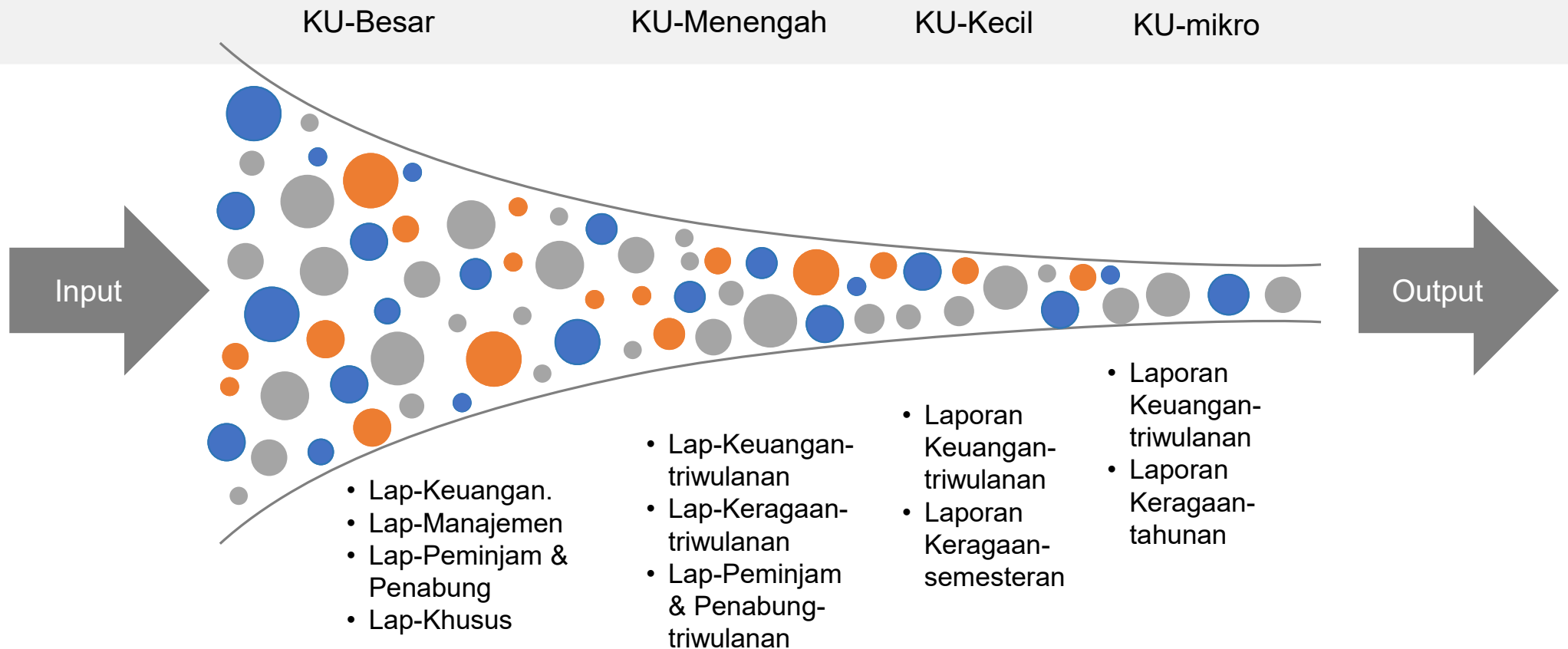


LAPORAN KERAGAAN

Laporan Keragaan adalah laporan aktivitas usaha Koperasi simpan Pinjam di-luar laporan yang tercantum dalam Laporan keuangan



Hubungan Klasifikasi Usaha dengan Laporan



BENTUK LAPORAN

Ada 3 Skala Koperasi dan cara pengiriman Laporan





BAGIAN IV **PROSES** **PENGAWASAN**

PROSES PENGAWASAN



Kepatuhan



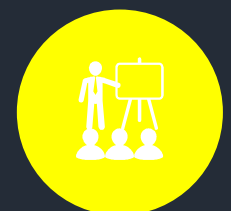
Kelembagaan



Usaha Simpan
Pinjam



Pengenaan
Sanksi



Penilaian
Kesehatan

PEMERIKSAAN KEPATUHAN

Kepatuhan Legal

Kepatuhan Usaha

Kepatuhan Transaksi



HUKUM PUBLIK

- UU
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan menteri

HUKUM PRIVAT

- Anggaran Dasar
- Anggaran Rumah Tangga
- Peraturan Khusus

PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN

ASPEK ORGANISASI

Struktur Tugas

Rentang Kendali

Satuan Pengendalian Internal

akta Pendirian Koperasi &Pengesahan

Anggaran Dasar

Pengesahan AD

Surat Ijin Usaha

Pemeriksaan Organisasi

Pemeriksaan Kinerja Keuangan

Pemeriksaan laporan Keuangan

BIDANG PEMERIKSAAN

ASPEK LEGALITAS

PEMERIKSAAN USAHA SIMPAN PINJAM

Pemeriksaan USP Konvensional

Pemeriksaan USP syariah

Pemeriksaan laporan Keuangan

Penghimpunan Dana

Penyaluran Dana

Keseimbangan Dana dan
Kinerja Keuangan



BIDANG PEMERIKSAAN

OBJEK
PEMERIKSAAN

PENERAPAN SANKSI

BERJENJANG

BEBAS (TIDAK BERJENJANG)

KUMULATIF INTERNAL & EKSTERNA

TEGURAN TERTULIS

LARANGAN BAGI PENGURUS
DAN PENGAWAS

PENCABUTAN IJIN USAHA SP

PEMBUBARAN KOPERASI

CARA PENERAPAN SANKSI

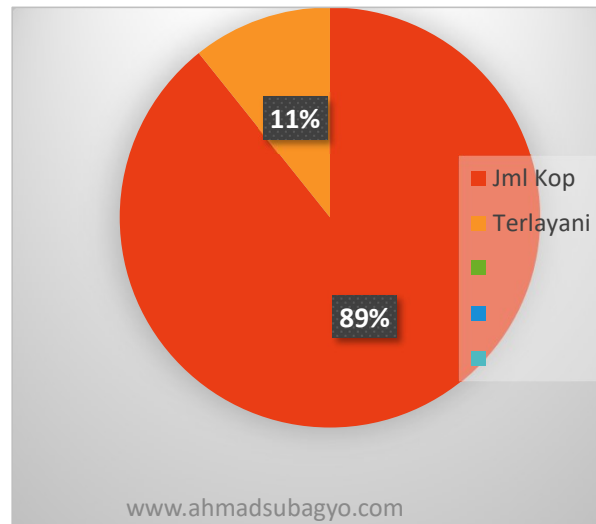
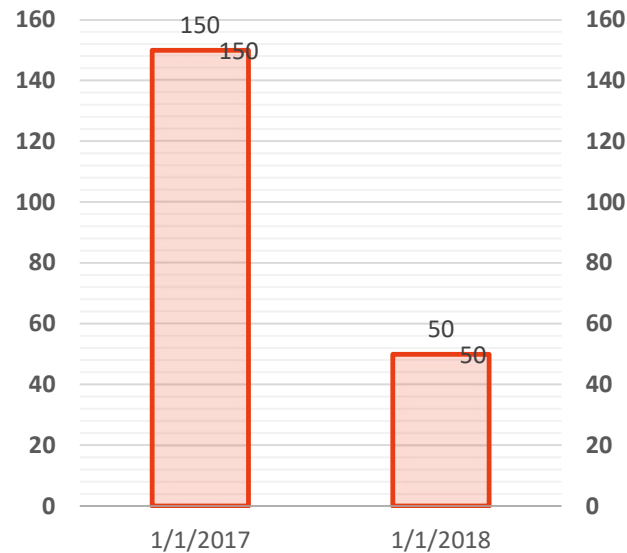
BENTUK SANKSI



Sumber Daya

Ada 3 Bidang Pemeriksaan Struktur Organ terdiri dari:

1. 1 orang Asdep
2. 3 orang Kepala Bidang
3. 6 orang Kasub-bidang
4. Total pejabat pengawas sebanyak 87 orang



OUTPUT ASDEP

TAHUN 2018

- Target Pengawasan Bidang kepatuhan sebanyak 50 Koperasi/tahun
- Hasil Pengawasan bidang kepatuhan sebanyak 50

Tahun 2017

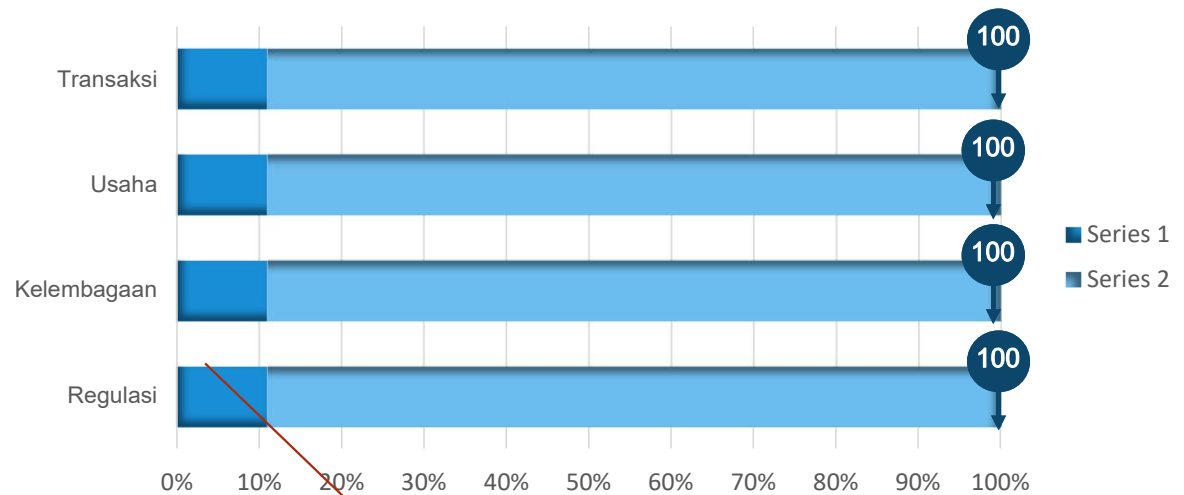
- Target Pengawasan Bidang kepatuhan sebanyak 150 Koperasi/tahun
- Hasil Pengawasan bidang kepatuhan sebanyak 150

EXISTING STRATEGIC

Sasaran pengawasan meliputi regulasi, kelembagaan, usaha dan transaksi yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam

Jangkauan kedalaman pemeriksaan untuk satu Koperasi sebesar 100% dengan melibatkan seluruh asisten deputi pengawasan, namun hasil (output) dari proses pengawasan tidak lebih dari 11% dari seluruh Koperasi

JANGKAUAN & SASARAN



Seluruh Asdep memeriksa koperasi yang sama

CONCEPT RECOMENDATION

STRATEGI PENGAWASAN

KUK MIKRO

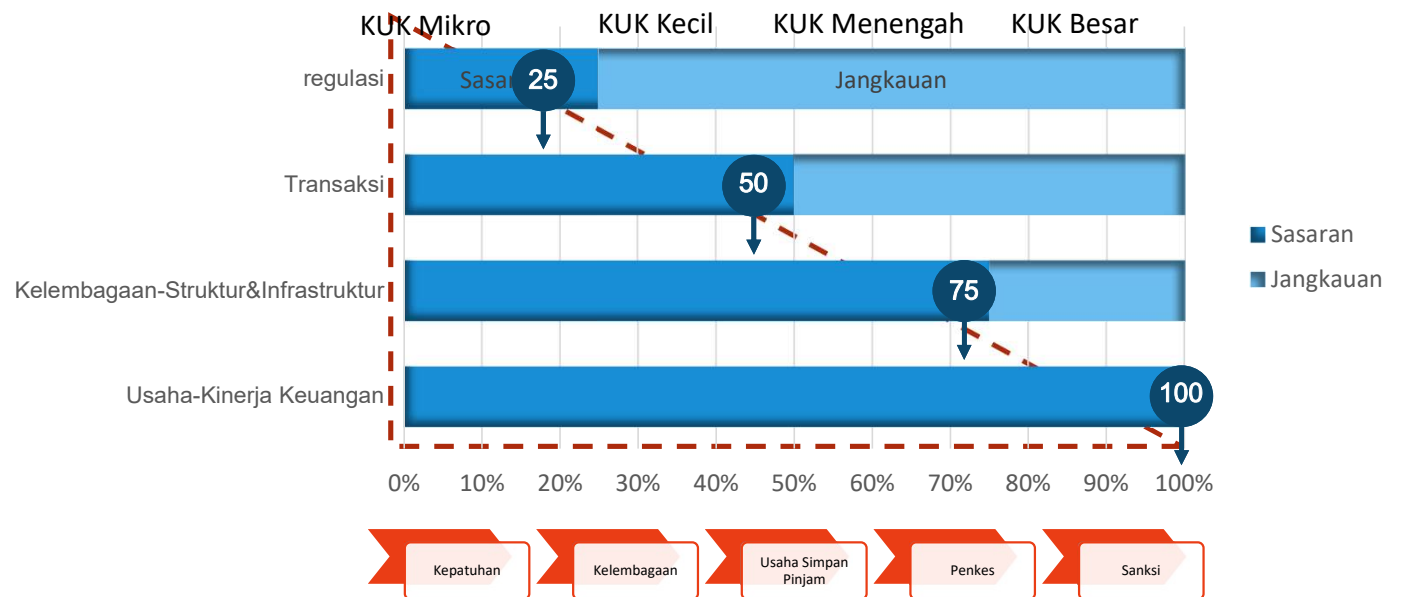
KUK KECIL MENENGAH BESAR



STRATEGIC PLAN

Pengawasan terhadap KUK-Mikro lebih ditekankan ke usaha dan kelembagaan dalam rangka pembinaan & penguatan, sedangkan untuk Koperasi KUK-kecil-menengah-besar ditekankan pada regulasi dan transaksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada money laundering-bebas APU-PPT-Pajak-Fraud dan pencegahan terjadinya risiko sistemik.

JANGKAUAN & SASARAN





PRINSIP PENGAWASAN

CONCEPT RECOMENDATION

- 01 PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
- 02 SEMUA KOPERASI BERHAK MENDAPATKAN PENGAWASAN
- 03 PROSES PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA INTEGRATIF-KOMPREHENSIF DAN BERKESINAMBUNGAN
- 04 DATA YANG DIOLAH ADALAH DATA YANG BENAR & OUTPUT YANG DIHASILKAN MENJADI SUMBER KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN

3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

3 KEY SUCCESS FACTORS

1

SISTEM PELAPORAN ONLINE

USP mengirimkan LAPORAN melalui system online sesuai ketentuan yang berlaku

2

PEJABAT PENGAWAS FUNGSIONAL

Ada pejabat pengawas yang dedikatif dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan

3

REGULASI YANG MENDUKUNG

Perangkat hokum-perundang-undangan dan Peraturan di bawah UU mendukung system pengawasan yang efektif

PELAPORAN

LAST CONDITION

01

LAPORAN KOPERASI KEPADA PEJABAT PENGAWAS

02

LAPORAN PEJABAT PENGAWAS DI TINGKAT KAB/KOTA KE PROVINSI

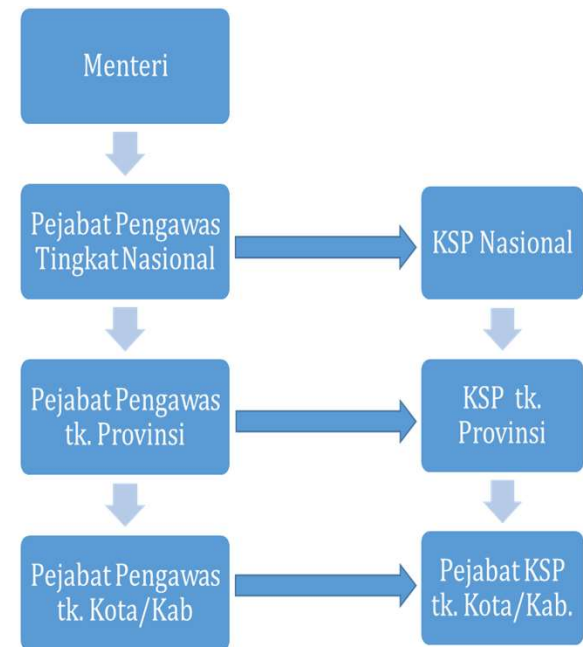
03

LAPORAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PROVINSI KE KEMENKOP

04

LAPORAN PUBLIKASI KEMENKOP UNTUK AKUNTABILITAS PUBLIK

EXISTING CONDITION



JENIS LAPORAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

1-LAPORAN TRIWULANAN

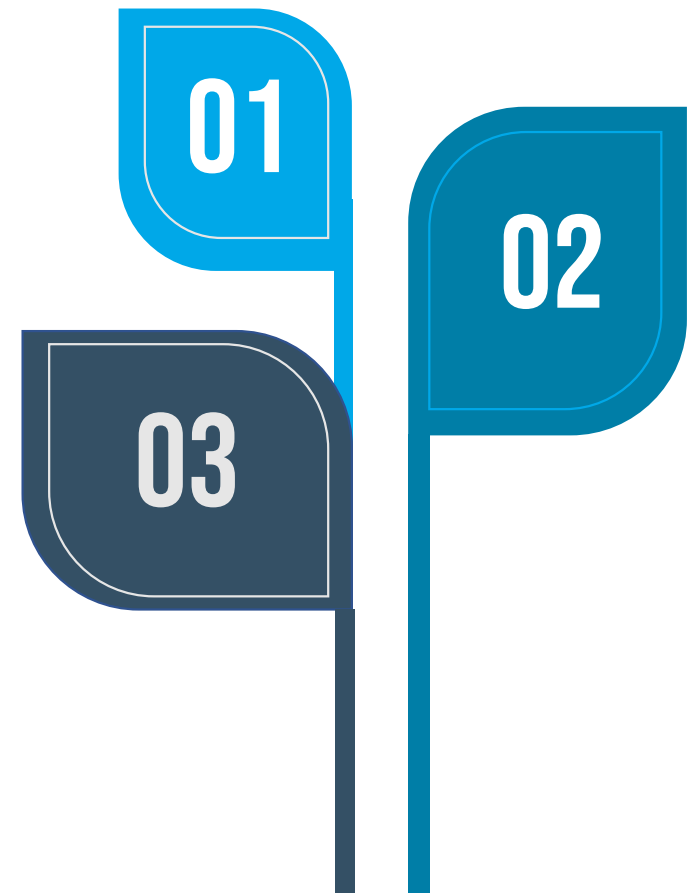
Laporan yang dikirimkan 3 bulan sekali kepada Pejabat Pengawas Koperasi yang meliputi: Laporan Keragaan – Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen

2-LAPORAN TAHUNAN

Laporan yang dikirimkan 3 bulan sekali kepada Pejabat Pengawas Koperasi yang meliputi: Laporan Keuangan dan Laporan Keragaan Serta Laporan Pengguna Jasa Definitif

3-LAPORAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Laporan Keuangan-Laporan Usaha-Laporan Pertanggungjawaban
Pengelola/Pengurus/Pengawas-RAPBK



PROSEDUR PELAPORAN

- 01.** KOPERASI MENUNJUK PETUGAS ADMIN PELAPORAN & PENANDATANGAN INTEGRITAS OLEH PENGURUS
- 02.** LAPORAN DISUSUN DAN DIINPUT OLEH PETUGAS/ADMIN KOPERASI KE DALAM SISTEM ONLINE
- 03.** LAPORAN YANG DIINPUT DIVALIDASI OLEH PENANGGUNG JAWAB (PENGURUS KOPERASI)
- 04.** LAPORAN DIKIRIMKAN MELALUI APLIKASI PELAPORAN ONLINE



LAPORAN KERAGAMAN

Profil Koperasi

Indikator Jasa

Indikator kelembagaan

Indikator kepatuhan

Indikator Pengurus

Indikator Pinjaman

Rekomendasi		
Kolom Isian	Isian/Pilihan/Tabel	Frekuensi Pengisian
Profil		
Nama dan Alamat	Isian	Pembukaan akun & jika ada perubahan
Nomor dan Tanggal Badan Hukum (Akta Pendirian)	Isian	
Nomor NPWP	Isian	
Telepon, Email, Web	Isian	
Izin Usaha dan Nomor Izin Usaha	Isian	
Bentuk Koperasi	Pilihan. Primer/Sekunder; Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional. Hanya USPK/USPSSK	
Jenis Koperasi	Pilihan. Konsumsi/Produksi/Serba Usaha/Simpan Pinjam. Hanya USPK/USPSSK	
Sektor Usaha	Pilihan. Sembilan lapangan sektor.	
Kelompok Koperasi	Isian	
Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang	Tabel. Nama, Alamat Kantor Cabang, Nomor Surat Izin Pembukaan, Pemberi Izin	
Modal penyertaan	Tabel. Jumlah dan Sumber	Triwulanan
Hibah	Tabel. Jumlah dan Sumber	
Indikator Jasa		
Bunga Pinjaman Anggota	Isian % suku bunga pinjaman	Triwulanan
Bunga Pinjaman Calon Anggota	Isian % suku bunga pinjaman	
Provisi Pinjaman Anggota	Isian % suku bunga pinjaman	
Provisi Pinjaman Calon Anggota	Isian % suku bunga pinjaman	
Bunga Simpanan	Isian % suku bunga pinjaman	
Bunga Simpanan Berjangka	Isian % suku bunga pinjaman	
Indikator Kelembagaan		
Struktur Pengurus/Pengawas	Tabel Lampiran ...	Pembukaan akun & jika ada perubahan
Struktur Pengelola	Tabel Lampiran ...	
Data SDM Koperasi	Tabel Lampiran ...	
Rincian tugas	Ya/Tidak	
Dewa pengawas	Ya/Tidak	
SOM	Ya/Tidak	
SOP	Ya/Tidak	
Sistem pengamanan dokumen	Ya/Tidak	
Indikator Pemingkatan terhadap Prinsip Koperasi		
Simpanan pokok	Tabel. Jumlah Simpanan: Anggota & Calon Anggota, Perubahan Jumlah Simpanan: Tahun & Besarannya, Perbedaan Jumlah	Triwulanan
Simpanan wajib	Simpanan antar Anggota	
Keanggotaan	Tabel Lampiran ... Jumlah Anggota dan Jumlah Calon Anggota	
Pembagian SHU	Tabel. SHU yang diperuntukan: Pengurus, Pengawas, Anggota, Cadangan Usaha, Cadangan Risiko, Pendidikan, dan Pengembangan Wilayah (CSR)	
Rapat Anggota Terakhir	Tabel. Tanggal RAT Terakhir, Jumlah Kehadiran (Orang), Jumlah Kehadiran (% dari Total Anggota)	
Indikator Pengurus		
Visi	Ya/Tidak	Pembukaan akun & jika ada perubahan
Misi	Ya/Tidak	
Rencana kerja	Ya/Tidak	
Independensi dalam pengambilan keputusan	Ya/Tidak	
Komitmen pengurus dalam menyelesaikan masalah	Ya/Tidak	
Tersedianya peraturan perusahaan	Ya/Tidak	
Pemberian wewenang kepada pengelola	Ya/Tidak	
Tidak ada konflik kepentingan	Ya/Tidak	
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Ya/Tidak	
Kapasitas permodalan sendiri	Ya/Tidak	
Indikator Pinjaman		
Pinjaman lancar	% dari outstanding pinjaman	Triwulanan
Pinjaman kurang lancar	% dari outstanding pinjaman	
Pinjaman yang diragukan	% dari outstanding pinjaman	
Pinjaman macet	% dari outstanding pinjaman	

1- NERACA KSP

AKTIVA		31 Desember 2014	PASIVA		31 Desember 2014
I. ASET LANCAR					
1. Kas		2.240.509.130,00	I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2. Penempatan pada Bank atau KSP lain			1. Simpanan Sukarela		435.159.330.888,31
a. Giro dan Deposito		436.251.321.852,77	2. Simpanan Berjangka		1.367.318.393.033,00
b. Surat Berharga		293.000.000.000,00	3. Beban Yang Masih Harus Dibayar		2.009.547.353,20
3. Pinjaman yang diberikan		1.521.948.925.823,06	4. Pendapatan Diterima Dimuka		0,00
4. Penyisihan Pinjaman Tak tertagih		(9.871.209.901,42)	5. Kewajiban lain-lain		39.256.840.265,64
5. Pinjaman pada Koperasi Lain		30.370.879.375,60			
6. Perengkapan		0			
7. Pajak dibayar dimuka		0			
8. Biaya Dibayar Dimuka		9.181.196.660,22			
9. Pendapatan yang masih harus diterima		12.650.496.321,24			
10. Aset Lancar Lain		0			
			Jumlah Kewajiban Lancar		1.843.744.111.540,15
		2.295.772.119.261,47	II. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
II. ASET TIDAK LANCAR					
1. Investasi jangka Panjang			1. Pinjaman yang diterima		189.000.000.000,00
2. Properti Investasi			2. Hutang Bank		
3. Akumulasi penyusutan Properti Investasi			3. Hutang Jangka Panjang Lain		
			Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		189.000.000.000,00
III. ASET TETAP					
1. Tanah / Hak atas tanah		0,00	III. EKUITAS		
2. Bangunan		0,00	1. Simpanan Pokok		8.376.100.000,00
3. Mesin dan Kendaraan		0,00	2. Simpanan Wajib		50.498.651.823,73
4. Inventaris		91.301.178.825,95	3. Modal Penyertaan		272.459.056.501,87
5. Akumulasi Penyusutan aset tetap		(30.297.276.717,36)	6. Hibah		1.000.000.000,00
		61.003.902.108,59	8. Cadangan Resiko		32.346.066.150,49
			10. SHU Tahun Berjalan		11.109.826.755,52
			Jumlah Ekuitas		375.789.703.231,61
JUMLAH AKTIVA		2.408.533.814.771,76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.408.533.814.771,76

4- ARUS KAS

URAIAN	(Rupiah)
Arus kas dari aktivitas operasi	
Kas diterima dari pendapatan utama	236.863.587.857
Kas diterima dari pendapatan non operasi	21.353.466.792
Kas dibayarkan kepada pemilik dana	(120.128.683.946)
Kas dibayarkan untuk biaya-biaya	(126.978.543.947)
Arus kas bersih dari aktifitas operasi	11.109.826.756
Arus kas dari aktivitas Investasi	
Penjualan kendaraan	40.000.000
Pembelian Tanah	(6.000.000.000)
Arus Kas bersih dari investasi	(5.960.000.000)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penerbitan Surat Utang	-
Pembayaran utang jangka panjang	(6.078.325.201)
Arus Kas bersih dari pendanaan	(6.078.325.201)
Kenaikan kas dan setara kas	(928.498.445)
Kas dan setara kas awal	1.312.010.685
Kas dan setara kas akhir	2.240.509.130

2- PENDUKUNG

KOPERASI SIMPAN PINJAM		
Keterangan Pendukung		
No	Diskripsi	31 Desember 2014
1	Pinjaman berisiko (Tanpa Agunan)	0,00
2	Volume Pinjaman :	
	Volume Pinjaman pada Anggota	1.521.948.925.823,06
	Volume Pinjaman pada Non-Anggota	-9.871.209.901,42
	Total Volume Pinjaman Diberikan	1.512.077.715.921,64
3	Saldo Pinjaman Diberikan :	
	Pinjaman Anggota	0,00
	Pinjaman Non- Anggota	0,00
	Total Saldo Pinjaman Diberikan	0,00
4	Klasifikasi Pinjaman :	
	Pinjaman Lancar	1.426.453.464.800,53
	Pinjaman Kurang Lancar	61.030.151.925,50
	Pinjaman Diragukan	20.819.767.864,62
	Pinjaman Macet	13.645.541.232,40
	Jumlah Pinjaman diberikan	1.521.948.925.823,05
5	Pinjaman Yang Diberikan Bersih :	
	Jumlah Pinjaman diberikan	1.521.948.925.823,05
	Penyisihan Penghapusan Piutang Tak tertagih	12.650.496.321,24
	Total Pinjaman Yang Diberikan Bersih	1.534.599.422.144,29
6	Dana yang diterima :	
	Hutang lancar	1.843.744.111.540,15
	Hutang Jangka Panjang	189.000.000.000,00
	Modal sendiri	364.679.876.476,09
	Jumlah Hutang dan Modal	2.397.423.988.016,24
	Biaya Yang Masih Harus dibayar	-2.009.547.353,20
	Jumlah Dana yang diterima	2.395.414.440.663,04

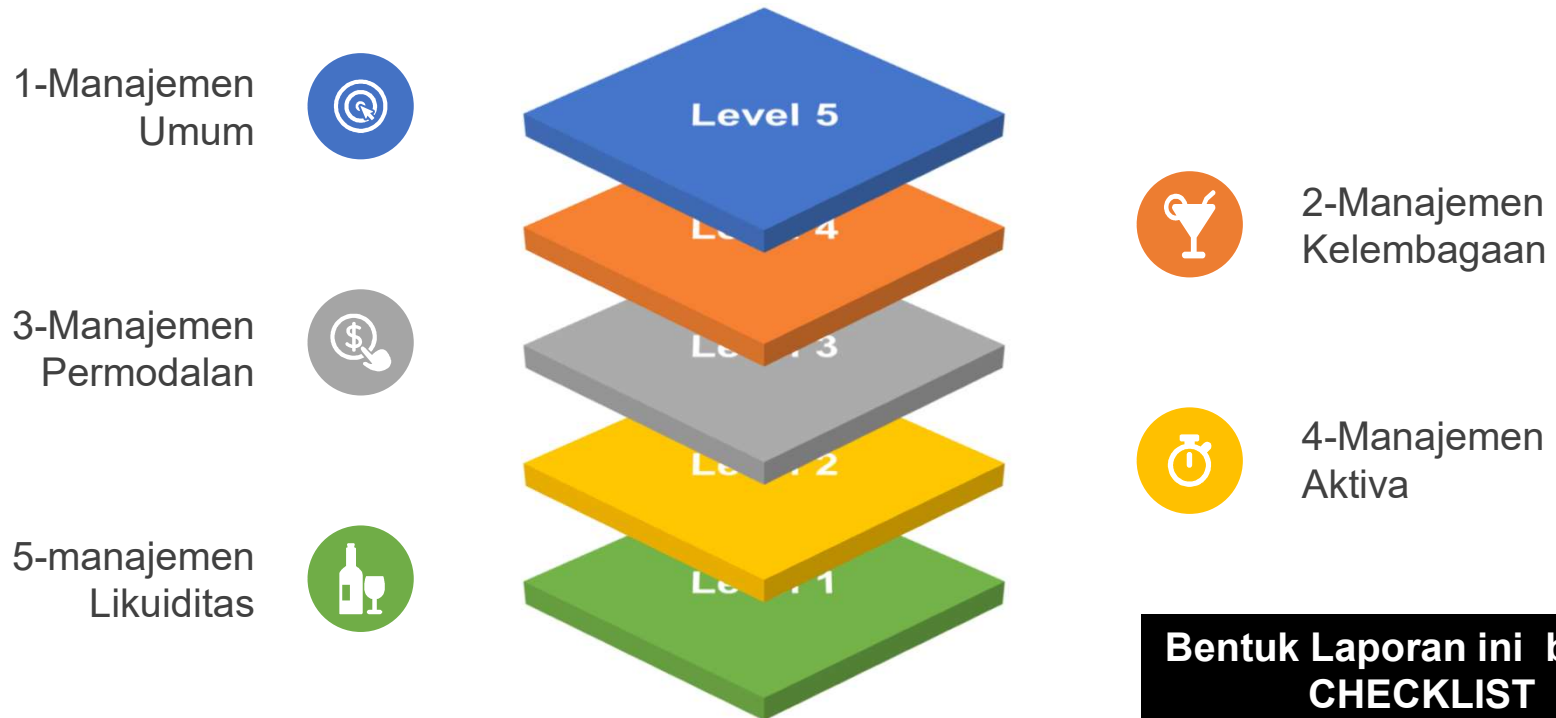
3- PHU

PERKIRAAN		31 Desember 2014
I. PARTISIPASI ANGGOTA		
A. Pendapatan utama Anggota:		
1. Pendapatan Jasa Pinjaman		222.444.861.223,26
2. Pendapatan Administrasi dan provisi		14.418.726.633,49
3. Pendapatan Provisi		
4. Pendapatan Operasional Lain		
Jumlah Pendapatan Bruto Anggota (1+2+3+4)		236.863.587.856,75
B. Beban Pokok :		
5. Jasa Simpanan		10.131.951.906,11
6. Jasa Simpanan Berjangka		109.996.732.040,15
Jumlah Beban Pokok (5+6+7+8)		(120.128.683.946,26)
PARTISIPASI NETO ANGGOTA (A-B)		
		116.734.903.910,49
II. PENDAPATAN DAN BEBAN DARI NON ANGGOTA		
7. Bunga Giro bank		6.081.856.981,72
8. Bunga Tabungan		5.151.279.528,47
9. Bunga Deposito bank		3.610.233.776,09
10. Repo		208.703.590,00
11. Pendapatan operasional lainnya		6.189.382.230,56
Laba Rugi Kotor dengan Non Anggota (7+8+9+10-11)		21.241.456.106,84
SISA HASIL USAHA KOTOR		
		137.976.360.017,33
III. BEBAN OPERASI		
C. Beban Usaha		
12. Beban Gaji dan Honor		42.491.531.056,73
13. Beban Lembur		8.498.306.211,35
14. Beban THR		3.642.131.233,43
15. Beban Perjalanan		9.712.349.955,82
16. Beban Telepon, Listrik / PAM		7.284.262.466,87
17. Beban Fotocopy dan ATK		4.856.174.977,91
18. Beban Administrasi dan Umum		14.568.524.933,73
19. Beban Pemasaran		23.066.831.145,08
20. Beban Sewa		2.428.087.488,96
21. Beban Pemeliharaan		4.856.174.977,91
22. Beban Penyusutan Aktiva Tetap		
23. Beban provisi & adm untukmendapatka		209.246.554,99
24. Beban Organisasi		5.364.922.943,92
Jumlah Beban Usaha (12+13+14+.....+25+26)		(126.978.543.946,70)
SISA HASIL USAHA SEBELUM BEBAN PERKOPERASIAN		
		10.997.816.070,63
D. Beban Perkoperasian		
25. Beban Pengawas dan pengurus koperasi		
26. Beban Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan		
27. Beban RAT		
Jumlah Beban Perkoperasian		0,00
SISA HASIL USAHA SETELAH BEBAN PERKOPERASIAN		
		10.997.816.070,63
E. Pendapatan dan Beban Lain - lain		
28. Pendapatan Penyertaan dan lainnya		3.524.261.805,73
29. Beban Lain - lain		(3.412.251.120,84)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - lain		112.010.684,89
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		
		11.109.826.755,52
F. Pajak Penghasilan		
		1.110.982.675,55
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK		
		9.998.844.079,97

TECHNICAL RECOMENDATION

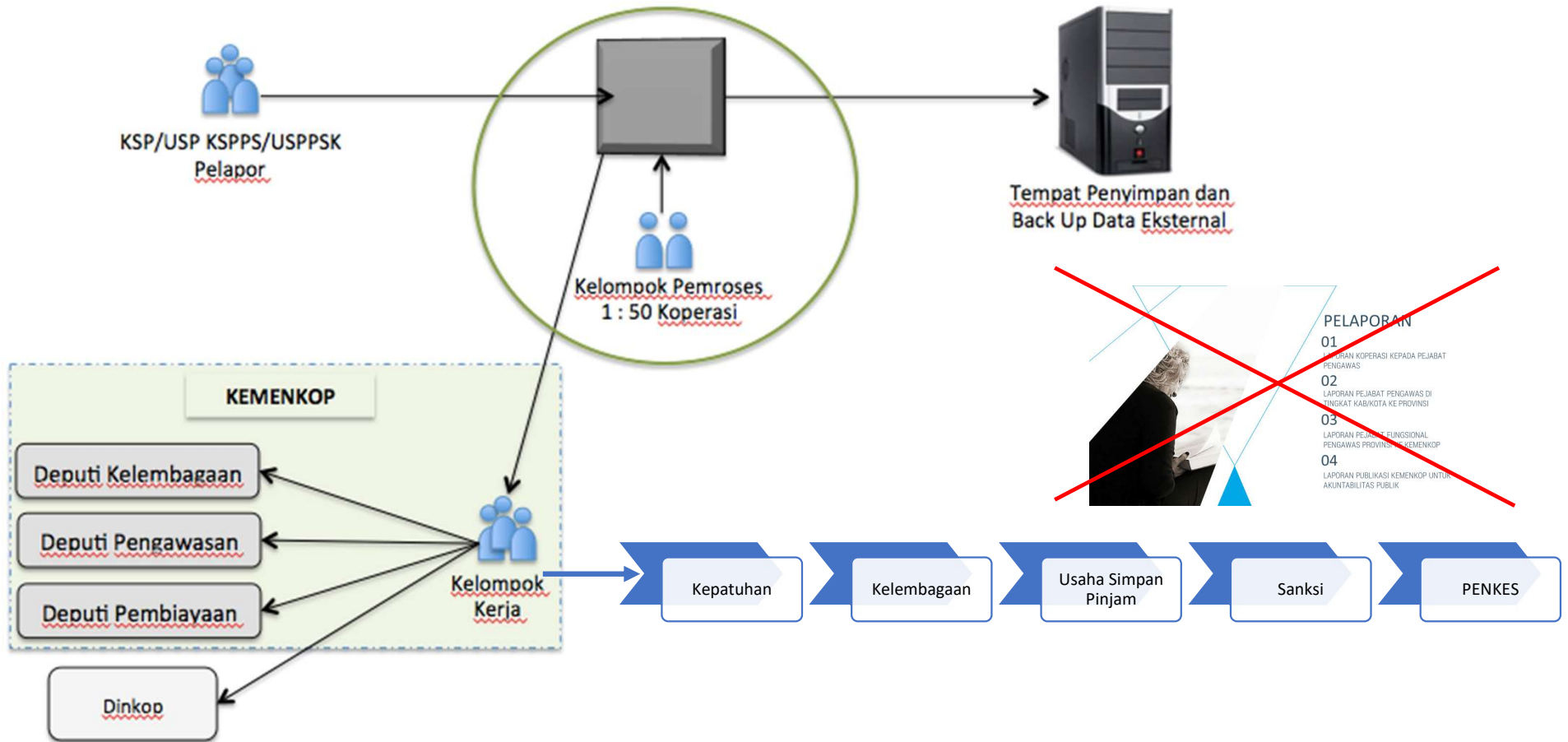
LAPORAN MANAJEMEN

Laporan ini akan memberikan informasi terhadap Pengawas tentang kelengkapan struktur dan infrastruktur Organisasi Koperasi



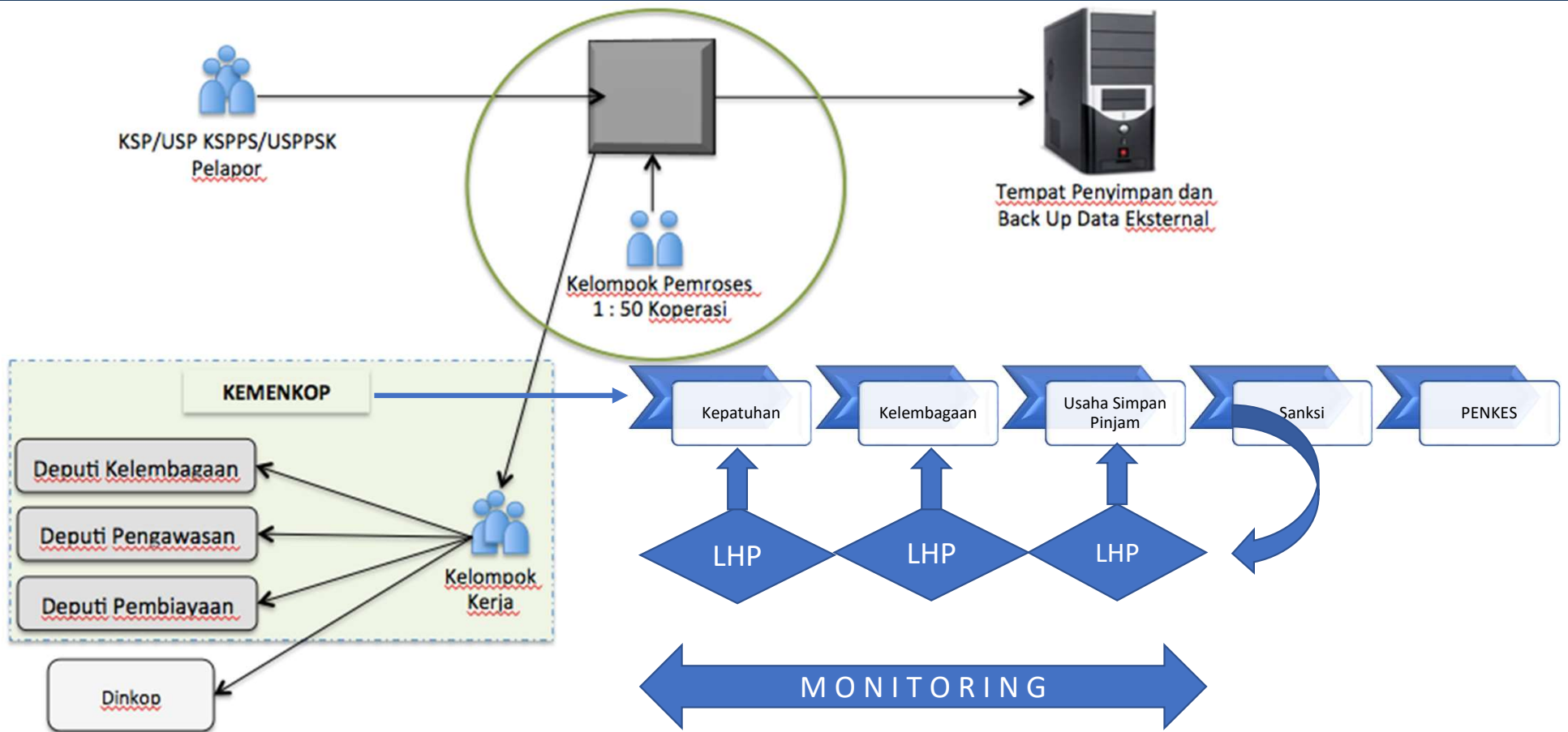
Bentuk Laporan ini berupa CHECKLIST

PROSES PELAPORAN ONLINE



TECHNICAL RECOMENDATION

PROSES PELAPORAN ONLINE



TECHNICAL RECOMENDATION

HUBUNGAN ALIRAN DATA & TUPOKSI ASDEP

Data akan mengalir dari Kepatuhan – Pemeriksaan kelembagaan – Pemeriksaan Usaha – Rekomendasi dari masing-masing ASDEP Pengawasan akan di-tindaklanjuti ASDEP Pengenaan Sanksi – bagi Koperasi yang dinyatakan LAYAK dilakukan PENKES, akan dilanjutkan dengan PENILAIAN KESEHATAN oleh Asdep Penkes



PROSES PENGAWASAN



1-Kepatuhan

Menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan Kepatuhan, Koperasi diminta untuk memperbaiki dan memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip koperasi

Proses pemeriksaan dan penilaian berdasarkan system “ban berjalan” dengan menggunakan single data yang dilaporkan oleh Koperasi



2-Kelembagaan

Menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan kelembagaan agar Koperasi memperbaiki struktur dan infrastruktur Lembaga



3-Usaha Simpan Pinjam

Hasil temuan merekomendasikan agar Koperasi memperbaiki proses bisnisnya



4-Pengenaan Sanksi

Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dan tidak ada perbaikan, akan diberikan SANKSI

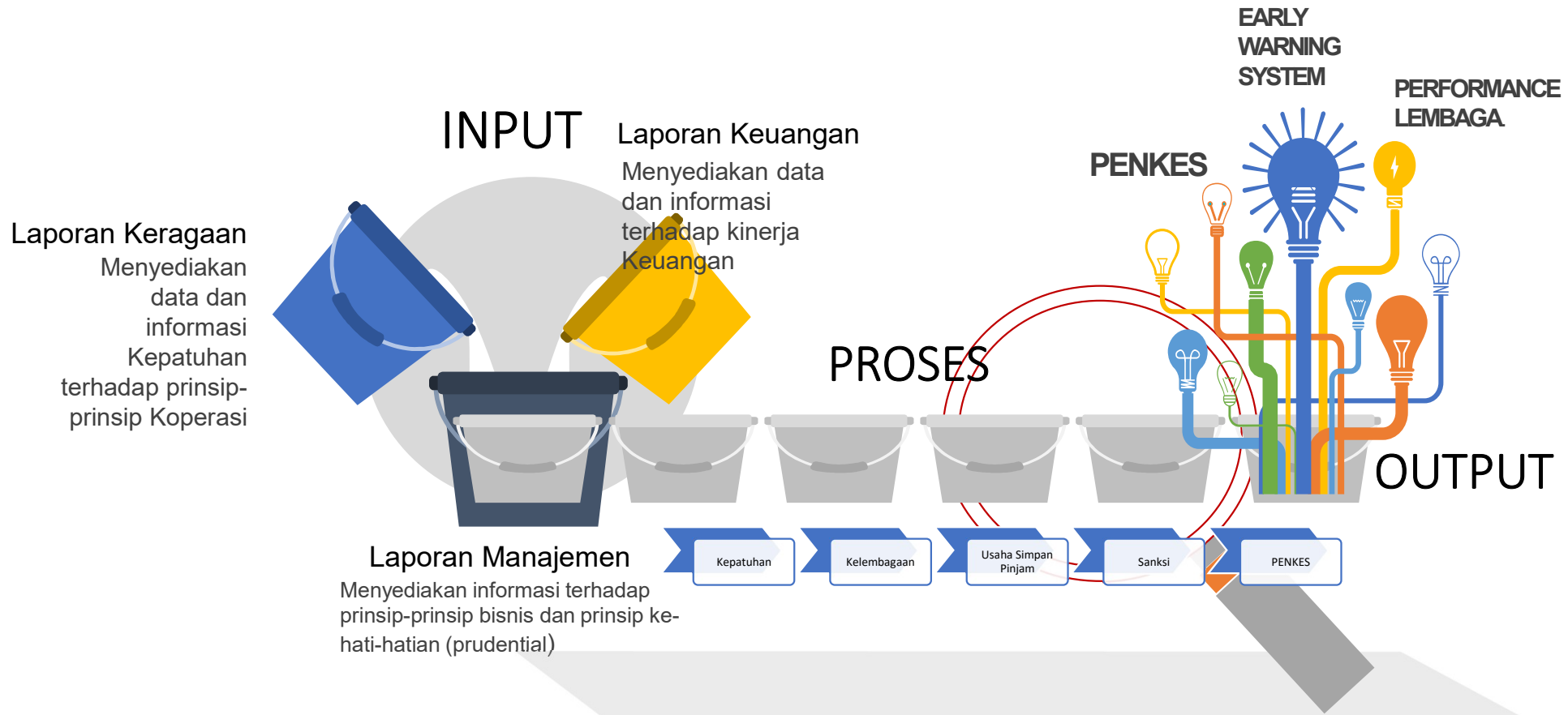
Final

5-Penilaian Kesehatan

Penilaian terhadap koperasi yang memenuhi syarat

TECHNICAL REKOMENDATION

PROSES PENGAWASAN



TECHNICAL RECOMENDATION



BAGIAN V

HASIL PENGAWASAN

(OUTPUT)

ADA 3 (TIGA) OUTPUT HASIL PENGAWASAN



1

HASIL PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI

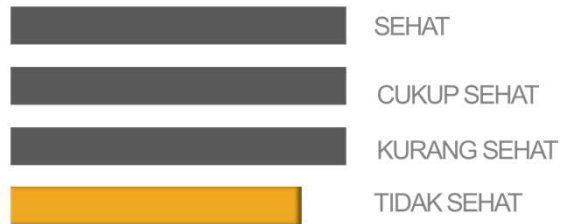
2

PETA RISIKO (EARLY WARNING SYSTEM)

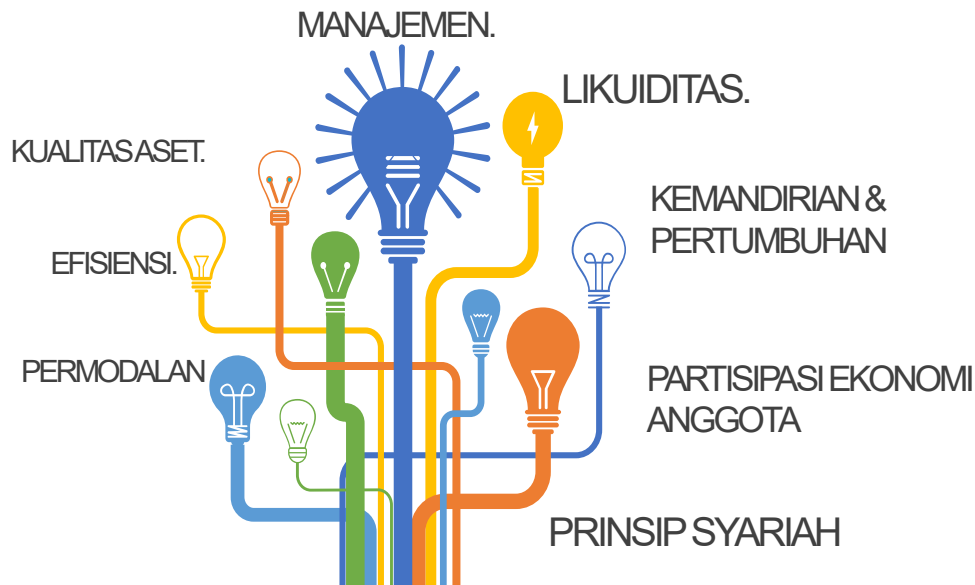
3

HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA-KELOLA YANG BAIK (GCG)

TINGKAT KESEHATAN



OUTPUT PENGAWASAN



CIRI KOPERASI YANG SEHAT



OUTPUT PENGAWASAN

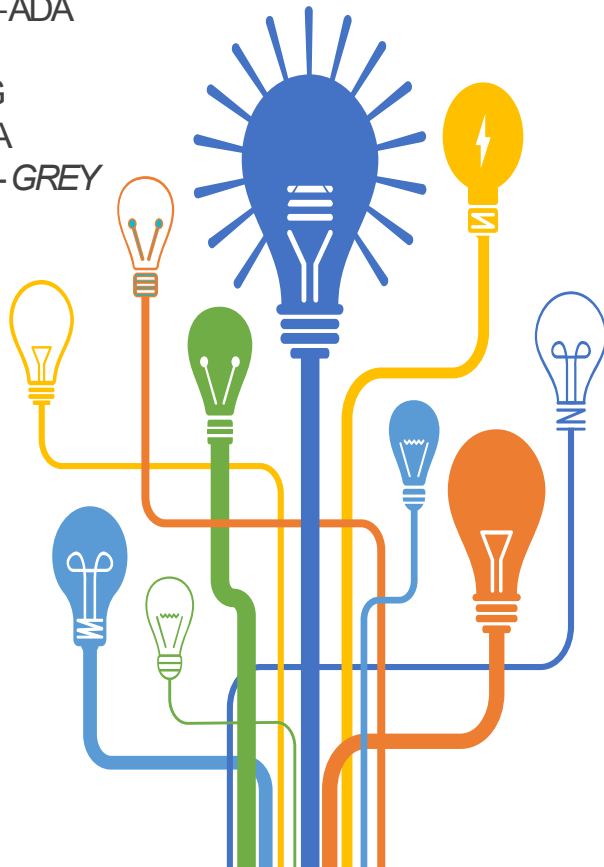


T Transparansi	Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
A Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Koperasi sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
R Responsibilitas	Kesesuaian pengelolaan Koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Koperasi yang sehat.
I Independensi	Pengelolaan Koperasi secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
F <i>Fairmess</i>	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak anggota yang timbul berdasarkan konvensi internal, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OUTPUT PENGAWASAN

RISIKO TINGGI MENGARAH PADA
KEBANGKRUTAN

RISIKO SEDANG – ADA
FAKTOR-FAKTOR
SIGNIFIKAN YANG
MENGARAH PADA
KEBANGKRUTAN- *GREY
AREA*



RISIKO RENDAH –
POSISI USAHA
DALAM KEADAAN
AMAN DAN STABIL

ORIGINAL MODEL				
Z factor =	$1.2 \times X1 + 1.4 \times X2 + 3.3 \times X3 + 0.6 \times X4 + 1.0 \times X5$			
1.2 X1	0,31	0,20	0,22	0,19
1.4 X2	0,83	0,76	0,80	0,79
3.3 X3	0,28	0,00	0,20	0,17
0.6 X4	0,74	0,28	0,32	0,13
1.0 X5	1,01	0,84	0,97	0,91
Z Score Model	3,17	2,08	2,50	2,19
Parameters Z score: Z > 3 is for healthy companies Z < 1.8 is distress zone				

SECOND MODEL PROPOSED				
Z' Score Model for Manufacturers, Non-Manufacturer Industrials, & Emerging Market Credits				
Z' factor =	$3.25 + 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4$			
Book Value of equity	484	390	371	375
Book Value of equity / Total Liab	0,29	0,22	0,22	0,22
Z' Score Model	7,77	6,32	6,92	6,71
Parameters Z' score: Z > 2.6 is for safe zone Z < 1.1 is distress zone				

<http://en.wikipedia.org/wiki/Z-Score>

3rd MODEL PROPOSED				
Z' Score Model for Manufacturers, Non-Manufacturer Industrials, & Emerging Market Credits				
Z' factor =	$6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4$			
Book Value of equity	484	390	371	375
Book Value of equity / Total Liab	152,79	187,82	148,48	171,61
Z' Score Model	4,52	3,07	3,67	3,46
Parameters Z' score: Z > 2.6 is for safe zone Z < 1.1 is distress zone				

A man in a blue and white checkered shirt and glasses is riding a bicycle on a city street at night. The background shows a restaurant with warm interior lights visible through the windows. A dark semi-transparent box is overlaid on the image, containing the title text.

BAGIAN VI

INFRASTRUKTUR PENUNJANG

INFRASTRUKTUR PENGAWASAN



REGULATOR

- UU-PP-PERMEN-
KEPMEN

- PENKES
- RISK RATING
- GCG

- DEPUTI PENGAWASAN
- PENGAWAS FUNGSIONAL

- DATA BASE KOPERASI
- SISTEM PELAPORAN ONLINE
- INSTRUMENT PENGAWASAN

REGULASI

OUTPUT

STRUKTUR

INFRASTRUKTUR

- Memiliki peraturan internal
(AD-ART-Persus/SOP)
- Memahami Peraturan ttg
Perkoperasian

- Memiliki Laporan Keuangan -
bulanan
- Memiliki Laporan RAT- tahunan

- Terpenuhinya Organ Koperasi;
- Memiliki SPI dan atau Akuntansi

- Memiliki Kantor Operasional
- Memiliki Kelengkapan Buku
Koperasi
- Memiliki fasilitas komputer

KOPERASI



BAGIAN VII

KESIMPULAN

SEBELUM PENERAPAN FRAMEWORK

Membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 Hari untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap satu (1) Koperasi

Memerlukan biaya antara Rp. 5 – 10 Juta untuk memeriksa satu Koperasi

Data absolute – proses tidak standar dan tindaklanjut hasil pengawasan kurang efektif

Jumlah yang diawasi maksimal 150 Koperasi dalam setahun

KESIMPULAN



www.ahmadsabagy.com

SESUDAH PENERAPAN FRAMEWORK

Membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 jam untuk memeriksa satu (1) Koperasi

Memerlukan biaya antara Rp. 50.000 – Rp. 100.000 untuk memeriksa satu Koperasi

Input data yang update – ada pertanggungjawaban data – proses yang standar dan hasil pengawasan yang diterima oleh stakeholder

Mampu mengawasi seluruh jumlah Koperasi yang aktif

SEBELUM PENERAPAN FRAMEWORK

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TIDAK MENGGUNAKAN STANDAR PERATURAN (PERDEP)

TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN LANGSUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Proses pemeriksaan dan output yang dihasilkan berbeda-beda untuk masing-masing level (Pusat-Daerah) tidak standar hasilnya

Hubungan kerja antar Asdep dalam pengawasan dan pemeriksaan sering terjadi REDUNDENT

KESIMPULAN



www.ahmadsabagyo.com

SESUDAH PENERAPAN FRAMEWORK

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MENGGUNAKAN STANDAR YANG SAMA

DENGAN SINGLE DATA & PROSES PENGAWASAN SECARA INTEGRATIF AKAN TERJADI SHARING DATA & INFORMASI BERSAMA

Proses pemeriksaan dan output yang dihasilkan untuk semua level pengawasan akan standar

Terjadi pembagian tugas yang lebih jelas dan terarah sesuai Tupoksinya masing-masing



REKOMENDASI

www.ahmadsubagyo.com

TIGA SYARAT PENERAPAN FRAMEWORK

01

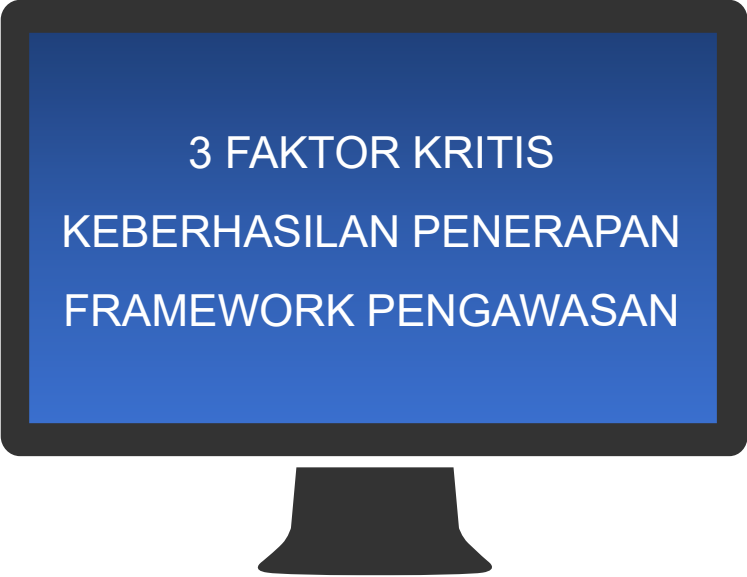
MENGAKTIFKAN KEMBALI SISTEM LAPORAN ONLINE

02

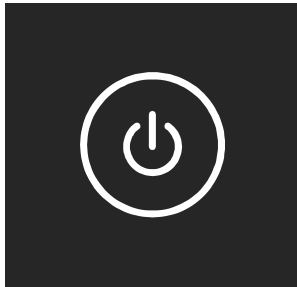
BERFUNGSIONYA PETUGAS PENGAWAS YANG MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

03

ADANYA DUKUNGAN REGULASI



3 FAKTOR KRITIS
KEBERHASILAN PENERAPAN
FRAMEWORK PENGAWASAN



Peraturan Pelaksanaan GCG



Penilaian Risiko (Risk Assesment)

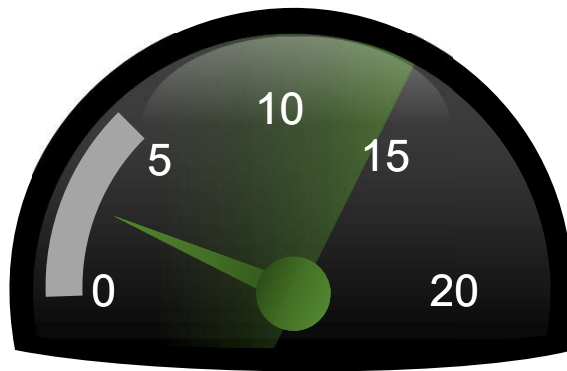


Prosedur Standar Pelaporan Koperasi



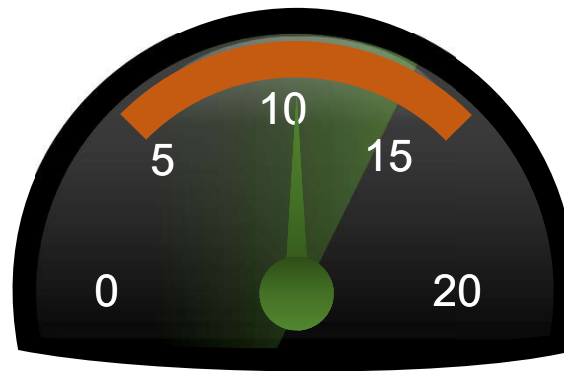
REKOMENDASI UMUM

TAHAPAN IMPLEMENTASI KERANGKA PENGAWASAN



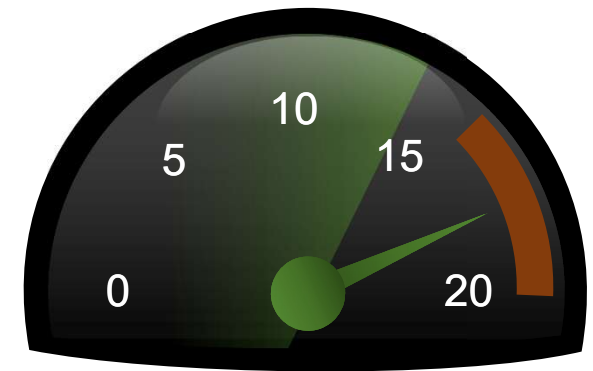
PHASE-1 (5th Pertama)

1. Penkes-Risk Awareness-GCG menjadi output Pengawasan;
2. Klasifikasi Usaha Koperasi
3. Laporan secara online;
4. Pemeriksaan satu pintu;
5. Pengawas berkompeten.



PHASE-2 (5th Kedua)

1. Penerapan pengawasan berbasis risiko
2. Penguatan Lembaga Penunjang (LPDB-Biro Informasi Pinjaman-Akuntan Publik-LSP,dsb)
3. Penerapan self assesment



PHASE-3 (5th Ketiga)

1. Penerapan tiga pilar tata kelola yang baik pada Koperasi
2. Pelaksanaan Rating
3. Pemberian ijin pendirian Lembaga Rating Independen

TARGET CAPAIAN PENGAWASAN

